

DAFTAR REFERENSI

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Andi Hamzah. cet. 12.

Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005.

Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. No. 8 Tahun 1981, LN No. 9 Tahun 1951, TLN No. 81.

Indonesia. *Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Tahun 2008.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Kekuasaan kehakiman*. UU No. 4 Tahun 2004, LN. No. 8 Tahun 2004, TLN. No. 4358.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. PP No. 27 Tahun 1983, LN No. 36 Tahun 1983, TLN No. 3258.

B. BUKU

Adji, Oemar Seno. (1980). *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga.

Alfiah, Ratna Nurul.(1986). *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: CV Akademika Presindo.

Garner, Bryan A. (2000). *Black Law Dictionary* (7th ed). St. Paul, Minnesota: West Publishing.

Hamzah, Andi. (2002). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Loqman, Loebby. (1990). *Pra-Peradilan di Indonesia* (cet.3). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mamudji, Sri et al. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (cet.1). Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum.
- Prajogo, Soesilo. (2007). *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia* (cet.1). Jakarta: Wacana Intelektual.
- Prints, Darwan. (1989). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- _____. (1993) *Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek* (cet.1). Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum* (cet.3). Jakarta: Penerbit UI.

C. INTERNET

- ”Andi Hamzah, Pokok-pokok Pikiran Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana,” <<http://www.legalitas.org/incl.php/buka.php?d=art+2&f=pokokkuhp.htm>>. 10 Desember 2008.
- ”Buyung: Tidak Perlu Ada Hakim Komisaris”, <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=9001&cl=Berita>>. 12 Mei 2008.
- ”Buyung Usulkan *Adversary System* dalam Revisi KUHAP”, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20507&cl=Berita>>. 19 desember 2008.
- ”Hakim Komisaris Dinilai Membahayakan”, <http://pt-makassar.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=187>. 8 April 2008.
- ”Konsep Hakim Komisaris Berpotensi *Abuse of Power* “, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17499&cl=Berita>>. 8 April 2008.
- ”KUHP Baru Mengantisipasi Kejahatan Nonkonvensional,” <<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=170057>>. 15 April 2008.

”Lembaga Baru Kontrol Aparat Penegak Hukum”, <http://www.komisiyudisial.go.id/index2.php?option=isi&do_pdf=1&id=524>. 20 Mei 2008.

“MaPPI FHUI, Pengawasan Horisontal Terhadap Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana,” <<http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=218&tipe=penelitian>>. 11 November 2007.

“MMS Consulting, Kajian Yuridis Mengenai Intepretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praktek Praperadilan,” <<http://m2s-consulting.com/mms/modules/articles/article.php?id=3>>. 11 September 2008.

”Praktek Penerapan KUHAP dan Perlindungan HAM,” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15603&cl=Kolom>>. 15 November 2008.

“Praperadilan Tidak Efektif, Revisi KUHAP Perkenalkan Institusi Hakim Komisaris,” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=8981&cl=berita>>. 11 November 2007.

D. MAKALAH/ARTIKEL

Departemen Kehakiman, *Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 TH. 1982, seperti yang dituliskan oleh Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya mengenai *Praperadilan vs. Hakim Komisaris* pada newsletter Komisi Hukum Nasional.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Dit. Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, “Rancangan Undang-undang No. Tahun 1974 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung”, sebagaimana yang dituliskan oleh Loebby Loqman dalam *Praperadilan di Indonesia*, hal. 32.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia 'Rancangan Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana' September 1979, seperti yang ditulis oleh Loebby Loqman dalam Pra-peradilan di Indonesia, hal. 38.

Indriyanto Seno Adji, "*Pra-peradilan ataukah Hakim Komisaris: Ide kearah Perluasan Wewenang,*" Makalah yang disampaikan dalam Sosialisasi RUU KUHAP yang diselenggarakan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Depkeh dan HAM di Jakarta, 22 Juli 2002.

